

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adian, Donny Gahral. *Demokrasi Kami*, Cetakan Pertama, Jakarta: Koekoesan, 2006.
- Admadja, I Dewa Gede. *Filsafat Hukum; Dimensi Tematis dan Historis*, Cetakan I, Malang: Setara Press, 2013.
- Ambardi Kuskridho. *Mengungkap Politik Kartel; Studi Tentang sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2009.
- Asshidiqie Jimly. *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi; Perspektif Baru Tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & Constitutional Law and Constitutional of Ethics*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.
- Bedner, Adriaan W. dkk., ed., *Kajian Sosio Legal*, Edisi Pertama, Bali: Pustaka Larasan, 2012.
- Fuady, Munir. *Teori negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Cetakan kedua, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Garner Bryan A. *Blacks Law Dictionary*, Eight Edition, USA: Thomson West, 2004.
- Giddens, Anthony. *Melampaui Ekstrim Kiri dan Kanan: Masa Depan Politik Radikal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Harahap, A. Syabirin. *Pokok-Pokok Pikiran Filsuf-filsuf Islam & Barat*, Semarang: Pustaka Nizamiyah, Tanpa Tahun.
- Hardiman, F. Budi. *Dalam Moncong Oligarki; Skandal Demokrasi di Indonesia*, Cetakan I, Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Harjono. *Transformasi Demokrasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Hermansyah. red., *Komisi Yudisial dan Keadilan Sosial*, Cetakan ketiga, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- . *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

- Husein Harun. *Pemilu Indonesia: Fakta, Angka dan Studi Banding*, Cetakan Pertama, Jakarta: Perludem, 2014.
- Kusnardi Moh. dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*, Cetakan keempat, Edisi Revisi, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Kusuma Candra. *Penelitian Interdisipliner Tentang Hukum*, Jakarta: Epistema Institute, 2013.
- Marbun S.F. *Hukum Administrasi Negara I*, Cetakan I, Yogyakarta: FH UII Press, 2012.
- . *Hukum Administrasi Negara II*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mas'udi, Masdar Farid. *Syarah Konstitusi UUD 1945 dalam Perspektif Islam*, Cetakan I, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2010.
- M.D. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- Muhammad Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Pamungkas Sigit. *Perihal Pemilu*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Mada, 2009.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.
- Sarbini Nur Hidayat. *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011.
- Siahaan Pataniari. *Politik hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta Pusat: Konpress, 2012.
- Snyder Jack. *Dari Pemungutan Suara ke Pertumpahan Darah; Demokratisasi dan Konflik Nasionalis*, Cetakan Pertama, Terjemah Martin Aleida dan Parakitri T. Simbolon, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2003.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3, Jakarta: UI Press, 1986.

Nasef M. Imam dan Zuhad Aji F. (ed), *Prosiding Seminar Nasional & Lokakarya* “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 di Indonesia, (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan Hans Seidel Foundation Indonesia), 2014 hlm 64.

B. MAKALAH DAN MAJALAH

Asshiddiqie Jimly. *Pengenalan Tentang DKPP Dalam Rangka Penegakan Kode Etik Penyelenggara Pemilu*, Makalah disampaikan dalam rangka Hari Ulang Tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke-61, di Jakarta, 2014.

International IDEA, *International Electoral Standards, Guidelines for Reviewing the Legal Framework of Elections*, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral

Bawaslu RI, “Modul Bimtek Bagi Bawaslu Provinsi Dalam Rangka Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Tahun 2015” Jakarta: Tidak diterbitkan, 2014.

R.A. Granita Ramadhani, *Analisis Aspek Legalitas Transaksi Efek Short-Shelling Pada Masa Krisis Keuangan (Studi Kasus: Penghentian Sementara Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tanggal 8-10 Oktober 2008 Disebabkan Penurunan Harga Secara Tajam Terkait Indikasi Short-Selling)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009.

Suryajaya Martin, “Teori-Teori Tentang Suara Lebih: Kritik atas Filsafat Politik Kontinental Kontemporer”, Makalah disampaikan di acara Diskusi Kenduri Filsafat Masjid Jendral Sudirman, Komplek Kolombo, Yogyakarta pada tanggal 13 Juni 2013.

YURIDIKA, No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember , 1997.

C. DOKUMEN

Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Bawaslu DIY dengan nomor permohonan 01/SKT/PILEG-DIY/IV/2014

Berita Acara Klarifikasi Bawaslu DIY terhadap Drs. Gandung Pardiman, MM. (Form model B.8-DD tertanggal 24 Maret 2014)

Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu DIY Nomor 01/BA-TM/BWASLU-DIY/III/2014 tertanggal 27 Maret 2014

Berita Acara Klarifikasi Bawaslu DIY terhadap Mujiyanto (Form model B.8-DD tertanggal 17 April 2014)

Berita Acara Klarifikasi Bawaslu DIY terhadap Indria Gunawan S.IP. (Form model B.8-DD tertanggal 19 April 2014)

Berita Acara Klarifikasi Bawaslu DIY terhadap Ambar Tjahyono, SE. (form model B.8-DD tertanggal 21 April 2014)

Berita Acara klarifikasi terhadap Eko Puji Lestari yang tertuang (form model B.8-DD tertanggal 4 Maret 2014)

Form model A1 tertanggal 17 Maret 2014

Form model SG-3 tertanggal 20 Maret 2014

Form model B.2-DD Nomor 01/TM/PILEG/III/2014 tertanggal 21 Maret 2014

Form model B.9-DD tertanggal 26 Maret 2014

Form model SG-3 tertanggal 27 Maret 2014

Form model B.9-DD tertanggal 31 Maret 2014

Form model SG-3 tertanggal 17 April 2014

Kajian Bawaslu DIY terhadap laporan nomor 05/LP/PILEG-DIY/IV/2014 tertanggal 17 April 2014

Form model SG-3 tertanggal 19 April 2014

Form model SG.3 tertanggal 22 April 2014

Form model SG.3 tertanggal 23 April 2014

Keputusan KPU Kabupaten Gunungkidul No. 01/KPTS/KPU Kab-13-329619/2014 tentang Pengangkatan dan Penetapan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Gunungkidul Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

Kajian Panwaslu Kabupaten Gunungkidul yang tertuang dalam form model B.9-DD tertanggal 7 Maret 2014.

Laporan Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014.

Laporan Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD oleh Bawaslu DIY Tahun 2014

Laporan Bawaslu DIY Nomor 05/LP/PILEG-DIY/V/2014 tertanggal 14 April 2014

Laporan Akhir Pengawasan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 Kabupaten Sleman oleh Panwaslu Kabupaten Sleman.

Laporan Panwaslu Kabupaten Gunungkidul Nomor 01/LP/PILEG-GK/III/2014.

Resume pengaduan nomor 01/LP/PILEG-GK/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014

Standart Operasional Prosedur (SOP) Sentra Gakkumdu

Surat Bawaslu DIY Nomor 22/Bawaslu-DIY/I/2014 tertanggal 2 Januari 2014

Surat Polda DIY Nomor B/508/IV/2014/Ditreskrimum tertanggal 21 April 2014

Surat Bawaslu DIY nomor 648/Bawaslu-DIY/IV/2014 tertanggal 22 April 2014

Surat Polda DIY Nomor B/587/V/2014/Dit. Reskrimum tertanggal 8 Mei 2014

Surat Bawaslu DIY Nomor 299/Bawaslu-DIY/III/2014, Hal penerusan Pelanggaran Kode Etik.

Tanda Terima Berkas Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu No. 01/P-LP/PILEG/III/2014 tertanggal 11 Maret 2014.

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara 1981/76; TLN NO. 3209.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9.

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012; Nomor 11 Tahun 2012; Nomor 1 Tahun 2012; Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 906.

Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1603.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan perwakilan Rakyat, Dwan Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah.

Nota Kesepakatan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia No. 01/NKB/BAWASLU/I/2013; No. B/02/I/2013; No. Kep-005/A/JA/01/2013; Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Imam Wahyu Akbar, SH (Asisten Bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu DIY) pada tanggal 22 Agustus 2015 di Jakarta

Wawancara dengan Karim Mustofa (Koordinator Divisi Organisasi dan SDM tahun 2014) pada tanggal 2 Oktober 2015 di Yogyakarta.

Wawancara dengan Budi Murwati, SE., (Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Panwaslu Kota Yogyakarta) di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta, jl. Nyi Ageng Niss No. 544, Peleman, Rejowinangun, Yogyakarta, tanggal 12 Januari 2015.

Wawancara dengan Sri Rahayu Werdiningsih, SH. (Koordinator divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu DIY) di Kantor Bawaslu

D.I.Yogyakarta, jl. Nyi Ageng Niss No. 544, Peleman, Rejowinangun, Yogyakarta, tanggal 20 Agustus 2015.

Wawancara dengan Bagus Sarwono, S.Pd.SI di Kantor Bawaslu D.I.Yogyakarta, jl. Nyi Ageng Niss No. 544, Peleman, Rejowinangun, Yogyakarta, pada tanggal 16 September 2015.

F. DATA ELEKTRONIK ATAU WEBSITE

Djarmiko Boedi. "Karakter Hukum Keputusan PTUN," dalam <http://sertifikattanah.blogspot.com/2009/09/karakter-hukum-keputusan-ptun.html>, Akses tanggal 19 Juni 2015.

Puspitatata, "Kedudukan, Kewenangan, Dan Tindakan Hukum Pemerintah," dalam <http://puspitatata5.blogspot.com/2013/05/kedudukankewenangan-dan-tindakan-hukum.html>, Akses tanggal 19 Juni 2015.

W. Riawan Tjandra, "Perbandingan Sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan Conseil d'etat sebagai Institusi Pengawas Tindakan Hukum Tata Usaha Negara," dalam <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/Jurnal-No-3-Vol-20-Juli-2013/W-Riawan-Tj.pdf>, Akses tanggal 19 Juni 2015.

<http://www.kabarkota.com/berita-839-sulit-peroleh-bukti-kasus-gandung-pardiman-tak-diproses.html>, Akses tanggal 3 Juli 2015.

<http://funeducation4life.blogspot.com/2009/02/hubungan-hukum-etika-dan-norma.html>, Akses tanggal 23 Juli 2015

<http://www.jimly.com/pemikiran/makalah>, Akses tanggal 23 Juli 2015

<http://mahfudmd.com/index.php?page=web.OpiniLengkap&id=22>, Akses tanggal 27 Oktober 2015